

The Effect Of Regional Original Revenue And Capital Expenditure On The Financial Performance Of Local Governments In North Sumatra Province

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Utara

Siti Hajar ¹⁾; Agus Tripriyono ²⁾; Ayu Kurnia Sari ³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ putri482@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 Maret 2026]

Revised [28 April 2026]

Accepted [10 Mei 2026]

KEYWORDS

Local Own-Source Revenue (PAD), Capital Expenditure, Financial Performance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen keuangan pemerintah daerah dan publikasi statistik terkait selama periode 2019–2023. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda disertai uji asumsi klasik, uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Sig. 0,411 > 0,05), sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Sig. 0,031 < 0,05). Secara simultan, PAD dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Sig. 0,002 < 0,05). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,453 menunjukkan bahwa sekitar 45,3% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh PAD dan Belanja Modal, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah lebih konsisten didorong oleh optimalisasi belanja yang bersifat produktif, khususnya belanja modal, dibandingkan peningkatan PAD semata. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengelolaan PAD serta mengarahkan belanja modal secara efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kinerja keuangan.

ABSTRACT

Abstract—This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and Capital Expenditure on the financial performance of the regional government in North Sumatra Province. The research employs a quantitative approach using secondary data obtained from regional government financial reports and related statistical publications for the 2019–2023 period. Multiple linear regression is applied, supported by classical assumption tests, partial significance testing (t-test), simultaneous significance testing (F-test), and the coefficient of determination. The results show that, partially, PAD has no significant effect on financial performance (Sig. 0.411 > 0.05), while Capital Expenditure has a positive and significant effect (Sig. 0.031 < 0.05). Simultaneously, PAD and Capital Expenditure significantly affect financial performance (Sig. 0.002 < 0.05). The Adjusted R Square of 0.453 indicates that approximately 45.3% of the variation in financial performance can be explained by PAD and Capital Expenditure, while the remaining portion is influenced by other factors outside the model. These findings suggest that improvements in regional financial performance are more consistently driven by productive spending—particularly capital expenditure—than by increases in PAD alone. Therefore, the regional government should strengthen PAD management and allocate capital expenditure effectively and efficiently to enhance financial performance.

PENDAHULUAN

Negara pada hakikatnya adalah suatu wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki organisasi yang berfungsi mengurus kepentingan publik. Organisasi tersebut adalah pemerintahan yang bersifat nirlaba dan bertanggung jawab meningkatkan kualitas pelayanan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Peningkatan pelayanan bermakna pengelolaan keuangan yang baik mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan agar sumber daya publik digunakan efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam kerangka inilah otonomi daerah menjadi krusial, karena memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah menyusun kebijakan, mengelola keuangan, dan menggali potensi wilayahnya secara mandiri. Otonomi daerah mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk tidak semata bergantung pada pemerintah pusat, melainkan aktif memperkuat pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Bagi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang memiliki keragaman struktur ekonomi dan basis fiskal mulai dari kota besar seperti kota Medan hingga wilayah berbasis pertanian, pariwisata, dan industri

penguatan pendapatan menjadi fondasi untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas layanan publik. Desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menandai perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistik menuju sistem yang lebih otonom. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Kewenangan ini menuntut pemerintah daerah agar mampu mengelola sumber daya fiskalnya secara mandiri, efektif, dan efisien untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Implementasi otonomi fiskal menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga sebagai indikator sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan belanja secara optimal. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menjadi kerangka normatif yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan pada prinsip *value for money*, yaitu berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Konsep *value for money* mengandung makna bahwa setiap rupiah dana publik yang dikeluarkan harus menghasilkan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat.

Prinsip ini menjadi relevan mengingat keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Halim & Kusufi (2016), APBD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, melaksanakan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Keseimbangan antara ketiga komponen tersebut menjadi ukuran penting bagi stabilitas fiskal daerah. Ketidakseimbangan misalnya belanja yang melebihi pendapatan akan mencerminkan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat menimbulkan risiko fiskal di masa mendatang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kinerja keuangan didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan atau program yang dicapai dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran secara terukur dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Menurut Mardiasmo (2022), pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki tiga tujuan utama: (1) memperbaiki kinerja pemerintah daerah, (2) membantu alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan, serta (3) mewujudkan akuntabilitas publik yang transparan. Salah satu ukuran yang sering digunakan dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah rasio efisiensi keuangan, yang merupakan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah (Halim, 2008). Rasio efisiensi menggambarkan sejauh mana dana publik dikelola untuk menghasilkan output yang optimal. Daerah dinilai efisien apabila rasio efisiensinya kurang dari 100%, cukup efisien apabila sama dengan 100%, dan tidak efisien apabila melebihi 100% (Fathah, 2021). Rasio ini penting karena secara langsung mencerminkan efektivitas manajemen fiskal daerah dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Fenomena tersebut juga dapat dikaitkan dengan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal daerah, terutama pada masa pandemi COVID-19 sejak 2020. Pandemi berpotensi menekan aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak/retribusi, namun pada saat yang sama target anggaran PAD dapat disusun lebih konservatif atau mengalami penyesuaian sehingga realisasi tetap bisa melampaui target pada 2020–2021. Memasuki 2022–2023, meskipun pemulihan ekonomi mulai terlihat, masih mungkin terjadi ketidaksesuaian antara target yang meningkat dengan realisasi yang tidak secepat proyeksi, sehingga pada 2023 realisasi PAD belum mampu memenuhi anggaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terkait penetapan target PAD, efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta faktor ekonomi yang memengaruhi penerimaan, agar perencanaan pendapatan daerah ke depan lebih realistis dan dapat dicapai. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal.

Dalam struktur APBD, dua komponen yang paling berpengaruh terhadap efisiensi keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dari sumber-sumber internal tanpa bergantung pada transfer pusat. PAD yang tinggi menandakan tingkat kemandirian fiskal yang baik, sementara PAD yang rendah menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana perimbangan. Menurut Suryana (2021), peningkatan PAD akan memperkuat posisi fiskal daerah karena memperbesar kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Sumber PAD yang potensial antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun, efektivitas PAD juga sangat bergantung pada kebijakan fiskal daerah, kemampuan administrasi perpajakan, serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban

pajak dan retribusi. Selain PAD, belanja modal merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pengeluaran daerah. Belanja modal berfungsi sebagai investasi jangka panjang pemerintah untuk membangun infrastruktur dan aset publik yang mendukung kegiatan ekonomi serta pelayanan masyarakat. Menurut Antari & Sedana (2021), peningkatan belanja modal yang produktif dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, apabila belanja modal terlalu kecil atau tidak tepat sasaran, maka hasilnya tidak akan optimal dan justru dapat menurunkan efisiensi fiskal. Fluktuasi belanja modal di Sumatera Utara dalam periode 2019–2023 menunjukkan kecenderungan yang belum stabil.

Meskipun pada tahun 2022 belanja modal mengalami peningkatan signifikan sebesar 66%, penurunan tajam pada 2021 sebesar 36% menunjukkan bahwa kebijakan investasi publik belum sepenuhnya konsisten. Ketidakstabilan ini berpotensi menurunkan efektivitas belanja daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Urgensi penelitian, beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara PAD, belanja modal, dan kinerja keuangan daerah, namun hasilnya masih beragam. Amanda & Praptoyo (2023), Atmoko & Khairudin (2022), serta Padang & Padang (2023) menemukan bahwa PAD dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, Mulyani & Wibowo (2019) menunjukkan bahwa PAD tidak selalu memiliki pengaruh positif, karena peningkatan pendapatan belum tentu diikuti dengan efisiensi pengeluaran. Penelitian Purwasih (2019) juga menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks Sumatera Utara. Setiap daerah memiliki karakteristik fiskal, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda, sehingga hubungan antara PAD, belanja modal, dan efisiensi keuangan dapat bervariasi. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan data terbaru pasca-pandemi (2019–2023) untuk menganalisis dampak fluktuasi fiskal daerah terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoretis dalam bidang manajemen keuangan publik serta memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, mandiri, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Nasution (2020), kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu entitas pada periode tertentu, baik dari sisi pengumpulan maupun penyaluran dana. Kinerja keuangan dapat diukur melalui beberapa aspek seperti kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Penilaian kinerja keuangan dilakukan agar manajer atau pengelola keuangan dapat memastikan bahwa kewajiban terhadap pemilik dana dan tujuan organisasi dapat terpenuhi.

Kinerja keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan hasil atau pencapaian dari pelaksanaan aktivitas keuangan daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pengeluaran daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja tersebut dapat diukur menggunakan berbagai indikator keuangan yang merefleksikan sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan tanggung jawab pengelolaan anggarannya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pendapat Izzaty dkk. (2019) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan output atau hasil dari proses analisis terhadap pelaksanaan kegiatan keuangan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi telah menggunakan anggaran secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan daerah, kinerja keuangan juga mencakup hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diukur dalam bentuk uang, termasuk seluruh kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

SAP dituangkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan pengantar dan kerangka konsep akuntansi pemerintahan. Standar ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, termasuk laporan kinerja keuangan daerah, sehingga seluruh proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu pemerintah daerah. Secara umum, PAD adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama PAD adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, PAD menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana otonomi daerah telah berjalan secara efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan-undangan. Dengan demikian, PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal, serta menjadi ukuran kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa PAD terdiri atas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Agar PAD dapat optimal, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas layanan publik sebagai bentuk timbal balik terhadap kewajiban masyarakat membayar pajak dan retribusi. Namun peningkatan PAD harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan, agar tidak membebani masyarakat dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Modal

Dalam keuangan daerah, modal belanja adalah bagian penting dari APBD yang digunakan untuk membentuk atau menambah aset tetap yang bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat. Belanja ini bersifat investasi, bukan pengeluaran rutin, karena digunakan untuk membangun infrastruktur, membeli peralatan, dan menyediakan fasilitas publik. Menurut Mundiroh (2019), modal belanja adalah pembelanjaan langsung untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan aset dan sarana ekonomi masyarakat. Sholikhah dan Wahyudin (2021) menambahkan bahwa modal belanja merupakan investasi pemerintah untuk menambah aset tetap dan memperbesar kapasitas pelayanan daerah. Sementara itu, Novira Sartika (2021) yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa modal belanja adalah pengeluaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pengolahan data berupa angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2018). Penelitian bersifat asosiatif, yaitu bertujuan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi dari dokumen resmi, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA)/APBD serta publikasi instansi terkait. Waktu penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025, mencakup tahap penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (Y) adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen meliputi PAD (X1) dan Belanja Modal (X2). Kinerja keuangan diukur menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan, PAD dioperasionalkan sebagai porsi PAD terhadap total pendapatan, dan Belanja Modal dioperasionalkan sebagai porsi belanja modal terhadap total belanja. Unit analisis penelitian adalah pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan periode pengamatan 2019–2023 sesuai ketersediaan data. Teknik analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data (rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi), kemudian dilanjutkan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi agar model regresi memenuhi asumsi dasar. Selanjutnya, penelitian menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan ($Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$) untuk menguji pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel independen, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur besarnya kontribusi PAD dan Belanja Modal dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data pada variabel penelitian, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Kinerja Keuangan. Analisis ini bertujuan untuk melihat perkembangan nilai setiap variabel selama periode pengamatan serta kecenderungan perubahan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data tahun 2019–2023, nilai PAD menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019 PAD sebesar Rp 5.761.270.412.051 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 5.531.237.378.774 kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar Rp 6.402.714.086.506 dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 7.258.018.251.932 sebelum sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi Rp 7.225.688.105.702. Hal ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menghimpun PAD yang cenderung membaik setelah tahun 2020. Sementara itu, Belanja Modal cenderung mengalami peningkatan terutama pada tahun terakhir. Pada tahun 2019 Belanja Modal sebesar Rp 1.249.600.483.637 meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp 1.497.944.969.133 kemudian menurun pada tahun 2021 sebesar Rp 1.141.203.699.701 dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp 1.775.917.392.367. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2023 dengan nilai Belanja Modal mencapai Rp 2.629.552.763.164 yang menunjukkan adanya peningkatan alokasi belanja untuk pembentukan aset/infrastruktur pada periode tersebut. Untuk variabel Kinerja Keuangan yang diukur menggunakan rasio PAD/Pendapatan, nilainya berada pada rentang 42,8–57,6%. Nilai kinerja tahun 2019 sebesar 44,0%, menurun pada tahun 2020 menjadi 42,8%, kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar 45,6% dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 57,6%, sebelum sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 56,6%. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah cenderung meningkat pada akhir periode penelitian, yang mengindikasikan kemandirian fiskal daerah yang semakin baik.

Uji Normalitas

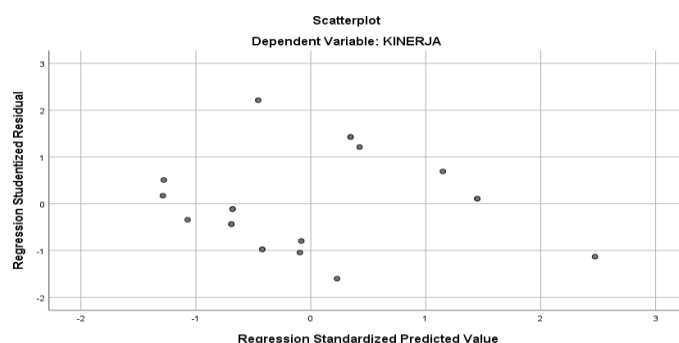
Tabel 1 One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test.

		KINERJA
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2060.6389
	Std. Deviation	553.28015
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.109
		.109
	Negative	-.077
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat pola sebaran titik pada grafik Scatterplot antara residual dan nilai prediksi. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu (misalnya pola menyempit/melebar, gelombang, atau menyerupai kipas). Selain itu, sebaran titik juga tampak berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak terkonsentrasi hanya pada salah satu sisi.

Gambar 1 Heteroskedastisitas



Uji Multikolinearitas**Tabel 2 Uji Multikolinearitas (VIF)**

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	
(Constant)	320638547	63336622				
PAD	0,442	0,532	0,201	0,507	1,971	
BM	0,245	0,104	0,559	0,507	1,971	

a. Dependent Variable: KINERJA

Analisis Regresi Linier Berganda

Karena penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen (PAD dan Belanja Modal), maka digunakan regresi linier berganda.

Tabel 3 Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a			
Model	Variabel	B	Std. Error
1	(Constant)	320638547	63336622
	PAD	0,442	0,532
	Belanja Modal	0,245	0,104

a. Dependent Variable: KINERJA

Uji t**Tabel 4 Uji t**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	320638546	63336621		5.062	0.000
	PAD	0.442	0.532	0.201	1.842	0.411
	BM	0.245	0.104	0.559	2.349	0.031

a. Dependent Variable: KINERJA

Uji f**Tabel 5 Uji f**

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	421400555	2	210700277	8.875	0.002 ^b
	Residual	403580613	17	237400360		
	Total	824981169	19			

a. Dependent Variable: KINERJA
b. Predictors: (Constant), BM, PAD

Berdasarkan tabel ANOVA, uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen PAD dan Belanja Modal (BM) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen KINERJA. Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 8,875 dengan nilai signifikansi (Sig.) 0,002. Karena nilai Sig. 0,002 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan, artinya PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap KINERJA.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Koefisien Determinasi

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.715 ^a	0.511	0.453	48723747

a. Predictors: (Constant), BM, PAD

Pembahasan

PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan uji t pada tabel Coefficients, variabel PAD memiliki nilai signifikansi 0,411 (lebih besar dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap KINERJA, sehingga hipotesis yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan ditolak (H1 tidak diterima).

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD belum tentu langsung meningkatkan kinerja keuangan daerah. Secara substansial, PAD yang meningkat bisa saja lebih banyak terserap untuk belanja rutin/operasional (misalnya belanja pegawai dan belanja barang jasa), sehingga tidak mendorong perbaikan indikator kinerja yang digunakan. Selain itu, apabila KINERJA diukur dalam bentuk rasio PAD terhadap pendapatan, maka perubahan PAD dapat "tertutup" oleh perubahan komponen pendapatan lainnya (misalnya transfer pusat), sehingga kontribusi PAD tidak tampak signifikan secara statistik. Kondisi ini juga dapat mencerminkan bahwa kualitas pengelolaan PAD (efektivitas, efisiensi pemungutan, dan pemanfaatannya) lebih menentukan daripada sekadar besarnya PAD.

Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji t menunjukkan variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai signifikansi 0,031 (lebih kecil dari 0,05) dengan koefisien arah positif, sehingga Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap KINERJA. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan diterima (H2 diterima).

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa belanja modal merupakan komponen belanja yang produktif karena berkaitan dengan pembangunan aset/infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Peningkatan belanja modal yang tepat sasaran dapat mendorong aktivitas ekonomi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya. Dengan kata lain, belanja modal dapat menjadi "pemicu" peningkatan kinerja keuangan, terutama bila aset yang dibangun benar-benar digunakan untuk meningkatkan produktivitas daerah dan memperluas basis penerimaan.

PAD dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan uji F pada tabel ANOVA, nilai signifikansi sebesar 0,002 (lebih kecil dari 0,05). Artinya, PAD dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap KINERJA, sehingga hipotesis simultan diterima (H3 diterima).

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa meskipun PAD tidak signifikan secara parsial, ketika PAD dikombinasikan dengan Belanja Modal dalam satu model, keduanya tetap mampu menjelaskan perubahan KINERJA secara signifikan. Hal ini dapat terjadi karena kinerja keuangan daerah pada praktiknya merupakan hasil interaksi antara kemampuan pendapatan dan pola pengeluaran. PAD menyediakan sumber daya fiskal, sedangkan belanja modal menunjukkan bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan untuk pembangunan. Dengan demikian, peningkatan kinerja keuangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan PAD, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh komposisi belanja, khususnya porsi belanja yang bersifat produktif seperti belanja modal. Temuan ini mengarah pada implikasi bahwa upaya peningkatan kinerja keuangan daerah perlu dilakukan melalui dua jalur sekaligus: memperkuat PAD secara berkelanjutan serta memastikan belanja modal dialokasikan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan karena nilai signifikansi sebesar $0,411 > 0,05$, sehingga perubahan PAD belum terbukti secara statistik mampu meningkatkan kinerja keuangan. Sebaliknya, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai signifikansi $0,031 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal cenderung diikuti

peningkatan kinerja keuangan daerah. Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Sig. 0,002 < 0,05), sehingga model regresi layak digunakan untuk menjelaskan variasi kinerja keuangan. Selain itu, capaian PAD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif; pada 2019, 2022, dan 2023 realisasi PAD masih berada di bawah target anggaran, sedangkan pada 2020 dan 2021 realisasi mampu melampaui anggaran, yang mengindikasikan perencanaan target PAD dan kemampuan realisasi pendapatan belum sepenuhnya konsisten dari tahun ke tahun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada peningkatan nominal PAD, tetapi juga memperkuat efektivitas pemungutan, pengawasan, serta perluasan basis pajak dan retribusi agar PAD lebih stabil dan dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan. Pemerintah daerah juga perlu mempertahankan dan meningkatkan Belanja Modal yang produktif dan tepat sasaran, terutama pada program pembangunan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan penguatan aktivitas ekonomi, karena variabel ini terbukti berpengaruh signifikan. Selain itu, penetapan target PAD dalam APBD sebaiknya lebih realistis berbasis potensi dan disertai evaluasi komponen PAD yang paling berfluktuasi agar kesenjangan antara anggaran dan realisasi dapat ditekan, khususnya seperti yang terlihat pada tahun 2023. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain yang juga memengaruhi kinerja keuangan, seperti dana transfer (DAU/DAK/DBH), belanja operasi/pegawai, dan indikator ekonomi daerah, serta memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, C. D., & Praptoyo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(5), 1–17.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080–1110.
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak Pendapatan Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296.
- Ayinde, K., Kuranga, J., & Lukman, A. F. (2015). Modeling Nigerian government expenditure, revenue and economic growth: Co-integration, error correction mechanism and combined estimators analysis approach. *Asian Economic and Financial Review*, 5(6), 858–867.
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan dampaknya pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 183–199.
- Ekasuryana, I. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor [Skripsi, Universitas Pakuan]. Universitas Pakuan.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Ghazali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2016). Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi. Salemba Empat.
- Indriyani, P., Haryanto, A., & Herlisnawati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja

- Modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kota Depok periode 2011–2017. Universitas Pakuan.
- Kementerian Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BN.2020/No.1781). Kementerian Dalam Negeri.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013–2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 2–10.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan. *Kompartemen*, 15(1), 57–66.
- Nugroho, F. (2012). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening (Studi kasus di Provinsi Jawa Tengah) [Tesis, Universitas Diponegoro]. Universitas Diponegoro.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)*, 9(2), 303–318.
- Pemerintah Pusat. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438).
- Pemerintah Pusat. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 4578).
- Pemerintah Pusat. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Metodologi Penelitian Untuk Bisnis_Pendekatan Pengembangan Keahlian* (2nd ed.).
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Hastuti, N. S., & Nasution, D. A. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 24(2), 157-170.
- Pangestu, R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1080-1088.

- Malau, E. I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390-399.